

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah ialah bagian atau subsistem dari kerangka kerja pemerintah pusat. Hubungan utilitarian antara pemerintahan pusat dan daerah menyangkut pembagian tugas dan spesialis yang harus dilakukan sehubungan dengan administrasi besar. Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan praktik pembangunan pada daerahnya dengan memanfaatkan sumber-sumber keuangan, serta diharapkan dapat menggali potensi yang ada dalam daerahnya sehingga sumber-sumber penerimaan dapat ditingkatkan.

Dalam hal dalam subsidi teritorial, DPRD diberikan posisi yang seluas-luasnya untuk mengawasi dana dan memiliki komitmen menanggung sendiri dana provinsi. Untuk membantu hasil dalam memperoleh aset pendukung kemajuan, negara-negara tetangga umumnya berupaya untuk terus mengkaji dan mengembangkan potensi yang dimiliki guna mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun Pendapatan Asli Daerah yaitu gaji yang mutlak didapatkan serta diungkap oleh pemerintah daerah yang diharapkan dapat memberikan daya adaptasi kepada kabupaten yang mendapatkan dan menghimpun aset sebagai pelaksanaan kemerdekaan wilayah.

Tercatat dalam peraturan No. 32 Tahun 2004 Pasal 157. Berikut ialah Sumber Pendapatan Daerah yang dicatat:

1. Pendapatan Asli Daerah yakni :
  - a. Hasil Pajak Daerah

- b. Hasil Retribusi Daerah
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2. Dana Pembangunan
  3. Pinjaman Daerah
  4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan beberapa sumber penerimaan diatas, Pendapatan Asli Daerah termasuk mata air pendapatan yang diklaim oleh pemerintah daerah. Jumlah pendapatan daerah cukup besar, salah satu sumbernya adalah hasil dari pajak daerah.

Adapun pajak daerah ialah komitmen wajib ke daerah oleh orang-orang yang bersifat memaksa sesuai peraturan tanpa mendapatkan angsuran langsung dan digunakan untuk kebutuhan provinsi untuk individu yang paling berkembang.. Tugas penilaian pendapatan sangat penting bagi suatu negara, dengan cara ini otoritas publik secara konsisten mengambil pendapatan di daerah pengeluaran untuk meningkat.

Berlandaskan UU RI No. 28 Tahun 2009 Pajak Kabupaten/Kota mencakup; Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Perkir, Pajak Air Tanah serta Pajak Sarang Burung Walet. Soetrisno (2009) merekomendasikan bahwa penilaian terdekat dapat digambarkan sebagai pemilihan wilayah berdasarkan pedoman yang ditetapkan untuk mendanai konsumsi provinsi sebagai organisasi politik (Badan yang melaksanakan kekuasaan dan kewenangan dalam masyarakat yang berhubungan dengan politik).

Pajak reklame ialah salah satu retribusi daerah yang diberikan pada Kabupaten/Kota.

Pajak Reklame ialah penilaian terhadap pengelolaan reklame/iklan. Reklame/Iklan ialah objek, alat aktivitas, ataupun media yang, sebagaimana ditunjukkan oleh strukturnya yang berbeda, untuk desain bisnis, digunakan sebagai presentasi, saran, atau percobaan sesuatu, administrasi, atau individu.

Sebagai aturan, reklame dipisahkan menjadi 2(dua), khususnya reklame tetap dan reklame insidentil. reklame tetap memiliki waktu 1 tahun sementara reklame insidentil memiliki waktu 30 hari (beberapa bulan). Pengenaan tarif pajak reklame tidak mutlak di semua wilayah Kabupaten / Kota di Indonesia, bergantung pada pertimbangan kecakapan oleh pemerintah negara bagian terdekat untuk memaksakan ataupun tidak memaksakan sebuah jenis tarif daerah/kota (Affriani, 2008:15).

Selain sebagai ibu kota provinsi/wilayah Jawa Timur, kota Surabaya sekaligus metropolitan terbesar di Jawa Timur. Sebagai kota metropolitan, Surabaya ialah daerah sentral kegiatan perekonomian dan sebagian penduduknya bergerak dibidang jasa, industri dan perdagangan. Banyak perusahaan yang berdatangan sehingga didalam mempromosikan produknya melalui media reklame sebagai media promosi yang bertujuan guna mengundang perhatian masyarakat agar membeli produk tersebut.

Dengan potensi pajak reklame terhadap pembangunan Kota Surabaya maka dari itu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya memerlukan strategi dalam pengelolaan keuangan daerah melalui berbagai biaya lingkungan untuk

situasi ini pajak reklame sehingga tujuan dan pengakuan yang didapat sesuai dengan yang dicapai. Berkaitan dengan fenomena diatas, maka peneliti akan mencoba mengkaji terkait pengelolaan pajak reklame di kota Surabaya, hambatan-hambatan didalam pemungutan pajak reklame di kota Surabaya serta bagaimana cara Bapenda mencapai target serta pelaksanaan pajak reklame di kota Surabaya, oleh sebab itu penulis tertarik untuk melaksanakan riset yang berjudul **“Strategi Peningkatan Pemungutan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya”**

## 1.2 Tujuan Studi Lapangan

- a. Untuk mengetahui strategi peningkatan pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat strategi peningkatan pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya.

## 1.3 Manfaat Studi Lapangan

### a. Bagi Peneliti

Sebagai media untuk memperluas ilmu pengetahuan mengenai strategi peningkatan penerimaan pajak reklame sehingga dapat memperluas potensi peristiwa di masa depan.

### b. Bagi Instansi Terkait

Sebagai kontribusi bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya dalam memperluas pembayaran pajak melalui publikasi perpajakan mulai sekarang.

c. Bagi Akademisi

Sebagai tambahan referensi bagi siapa saja yang akan melaksanakan studi lapangan dengan permasalahan ini.

#### 1.4 Ruang Lingkup Studi Lapangan

Ruang lingkup yang peneliti gunakan merupakan studi kasus berdasarkan penelitian dan observasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya yaitu dengan membandingkan fakta yang ada dengan permasalahan yang diteliti pada tahun 2017-2021 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya. Adapun permasalahan yang diteliti adalah bagaimana strategi peningkatan pemungutan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya.

#### 1.5 Metode Pengumpulan Data

Kegiatan untuk menemukan data yang dibutuhkan untuk menggapai tujuan penelitian disebut dengan pengumpulan data. Informasi akan menjadi bahan data sebagai sekumpulan realitas, angka, huruf, bagan, tabel, gambar, objek, kondisi, keadaan. Informasi adalah bahan baku untuk data. Dalam hal ini penyusunan tugas terakhir diperlukan beberapa metode dalam mengumpulkan informasi. Metode untuk berbagai informasi yang digunakan dalam ulasan ini yaitu:

##### 1. Observasi

Peneliti mengumpulkan informasi dengan persepsi langsung dari tempat/lokasi dan kesempatan, mencatat dan merekam informasi yang didapat.

## 2. Wawancara

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan melaksanakan percakapan kepada informan. Dalam wawancara ini metode yang terlibat dengan memperoleh data untuk tujuan riset melalui tanya jawab serta tatap muka antara pewawancara dengan sumber ataupun individu yang diwawancarai. Wawancara adalah informasi yang didapatkan secara langsung dari lapangan karena pertemuan dan persepsi dengan aparatur Bapenda.

## 3. Studi Pustaka

Peneliti melakukan pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan yang digunakan peneliti dalam mendapatkan area kekuatan utama untuk sebuah dan ide dengan tujuan agar masalah dapat diselesaikan terpecahkan. Peneliti juga meneliti tulisan yang ada (bahan atau sumber logis) seperti buku, dan mendapatkan informasi dari berbagai sumber yang berhubungan dengan pokok bahasan yang sedang dibicarakan, misalnya profil Bapenda, struktur organisasi dan berbagai informasi lainnya.